

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat kini telah menjadi perhatian banyak orang dan instansi pemerintah. Banyak kalangan masyarakat membuka diri memperhatikan permasalahan sosial dilingkungan tempat tinggalnya, ini dibuktikan dengan banyaknya Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang sosial, begitu juga dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan tenaga relawan sosial terlatih dan terdidik yang menjadi sumber aspirasi bagi relawan sosial dan pekerja sosial lainnya dengan aksi dalam membantu program pemerintah.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan salah satu sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa tenaga kesejahteraan sosial adalah: “Seseorang yang dididik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan / atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial”.

Definisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kemudian dipertegas kembali oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dalam peraturan tersebut Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan didefinisikan sebagai berikut: “Seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan / atau dinas /

instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten / kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.”

Peranan dan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam panduan Petunjuk Teknis wajib terlibat dan wajib dilibatkan dalam berbagai kegiatan serta Pendampingan Program sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bekerja dengan arahan dari Kementerian Sosial dan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tidak terkait langsung dengan struktur dalam pemerintahan kecamatan tetapi merupakan binaan dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Prinsip yang dianut adalah bersifat sukarela, semangat untuk mengabdikan, dan bertanggung jawab.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditugaskan di wilayah kecamatan mempunyai kecenderungan mewakili peran pekerja sosial dalam menangani masalah sosial di wilayah kecamatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan sosial yang ditemukan di wilayah kerjanya.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dibentuk dalam rangka membantu pemerintahan di setiap kecamatan, untuk mengumpulkan data penyalang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan data potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) telah diakui sebagai gerak dasar pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Kedua jenis data ini menjadikannya dasar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pelayanan sosial. Akan tetapi untuk mendapatkan data yang valid diperlukan metodologi dan instrument yang

benar-benar mampu mengukur jenis berdasarkan konsep dan indikatornya. Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan kesejahteraan sosial dimasyarakat selalu muncul kapan saja dan dimana saja, sehingga diperlukan penanganan dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan program.

Untuk menjembatani itu semua maka diperlukan yang namanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sbagai koordinator atau manager pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan, untuk membantu camat dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial di kecamatan. Dengan asumsi bahwa setiap program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutaat, dkk (2013) dengan judul “Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibagi menjadi 2 yaitu; (1) kinerja administratif (pelaporan dan kehadiran dalam kegiatan), dan (2) kinerja teknis (pendataan, koordinasi dan pendampingan). Hasil penelitian ini juga menjelaskan terkait belum adanya kejelasan posisi dalam penugasan, apakah sebagai petugas Kementerian Sosial di level kecamatan atau petugas Dinas Sosial di level kecamatan. Penelitian ini juga menyinggung keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di level kecamatan, serta belum secara jelas memahami posisi, tugas dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Andrianto, dkk (2014) dengan judul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penanggulangan

Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Malang”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan berperan sebagai Penghubung (*Broker*), Meningkatkan kemampuan masyarakat, Meningkatkan kinerja lembaga social, Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum, Komunikator serta Identifikator. Dalam hal ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di wilayah kerjanya, motivasi, serta kedekatan TKSK dengan warga sekitar dan *Stakeholder*.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yaitu dilakukan oleh Banan Syahidah Hasanah (2015), dalam skripsinya yang berjudul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Pelaksanaan Program Perluasan dan Percepatan Perlindungan Sosial (P4S) di Kota Surakarta” dinilai cukup efektif melalui program pemerintah yaitu Raskin dan BSM.F aktor pendukung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Pelaksanaan Program Perluasan dan Percepatan Perlindungan Sosial (P4S) dinilai cukup efektif karena memiliki peran strategis antara pemerintah dan masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Ruli Insani Adhitya (2016) dengan judul “Efektivitas peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (studi kasus Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Umbulharjo dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pakualam)”. menjelaskan Efektivitas peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Pakualam memperoleh penelitian positif dalam penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Kemiskinan dengan program pemerintah seperti KUBE, Subsidi Raskin, dan ASLUT.

Tabel 1.1
Luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo beserta Jumlah TKSK
di Kabupaten Sidoarjo

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (2014)	Jumlah TKSK
1.	Kecamatan Sidoarjo	62.56 Km ²	1 Orang
2.	Kecamatan Balongbendo	31.40Km ²	1 Orang
3.	Kecamatan Buduran	41.03Km ²	1 Orang
4.	Kecamatan Candi	40.67Km ²	1 Orang
5.	Kecamatan Gedangan	24.06 Km ²	1 Orang
6.	Kecamatan Jabon	81.00Km ²	1 Orang
7.	Kecamatan Krembung	29.55Km ²	1 Orang
8.	Kecamatan Krian	32.50Km ²	1 Orang
9.	Kecamatan Prambon	34.23Km ²	1 Orang
10.	Kecamatan Porong	29.82Km ²	1 Orang
11.	Kecamatan Sedati	79.43Km ²	1 Orang
12.	Kecamatan Sukodono	32.68Km ²	1 Orang
13.	Kecamatan Taman	31.54Km ²	1 Orang
14.	Kecamatan Tanggulangin	32.29Km ²	1 Orang
15.	Kecamatan Tarik	36.06Km ²	1 Orang
16.	Kecamatan Tulangan	31.21Km ²	1 Orang
17.	Kecamatan Waru	30.32Km ²	1 Orang
18.	Kecamatan Wonoayu	33.92Km ²	1 Orang

Sumber: *Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo*
<https://sidoarjokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/31> (Online) (Diakses 30 Oktober 2017)

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberdayaan social, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan harus bekerja seorang diri dalam satu wilayah kecamatan. Dilihat dari tabel diatas menunjukan bahwa setiap satu kecamatan memiliki satu orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan luas wilayah yang beragam. Ini menunjukan bahwa terjadi ketimpangan antara wilayah

penugasan dengan jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang harus bertanggung jawab membantu menyelenggarakan program pemerintah dalam menunjang kesejahteraan social masyarakat.

Berdasarkan berita online <http://www.beritasidoarjo.com/?p=8828> (diakses 30 Oktober 2017) menerangkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selama ini hanya mendapatkan dana insentif dari pemerintah sebesar Rp 400.000 perbulannya dan itu pun belum dipotong pajak. Dengan insentif tersebut diberikan untuk mendukung Tugas dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan notabennya melakukan pendampingan masyarakat serta melaksanakan program-program pemerintah dalam menangani masalah sosial dalam aspek kesejahteraan sosial. Memerlukan waktu yang banyak serta membutuhkan kendaraan operasional dalam melaksanakan tugasnya. Tuntutan atas hak kebutuhan hidup layak bagi diri dan keluarga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pun harus terpenuhi agar tanggung jawab profesionalitas tetap tinggi. Sangat penting untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab dan hak yang diterima Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan agar tidak ada kesenjangan antara tanggung jawab profesi dan tanggung jawab terhadap diri dan keluarga. Karena Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan keluarganya pun patut diperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi Hak Asasi Manusia.

Disini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mengalami dilemma. Di satu sisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bertugas dalam memperbaiki dan mendorong peningkatan kesejahteraannya dari para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tapi disisi lain kesejahteraan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sendiri belum terpenuhi. Dilematika ini

berpengaruh terhadap bentuk pelayanan sosial yang diberikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tersebut. Ini juga berpengaruh terhadap Eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dengan terjaminnya aspek Kesejahteraan Sosialnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakannya.

Kemensos sebagai pembentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selayaknya tidak menutup mata dan menyerahkan masalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tersebut kepada Pemerintah Daerah saja, tapi juga turut membantu memecahkan dilemma tersebut mengingat tugas dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dapat disamakan dengan tugas sari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Pemberdayaan Sosial di Kecamatan Tanggulangin?
2. Apa factor yang dapat mempengaruhi eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai oleh peneliti yaitu:

Untuk menjelaskan bagaimana eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Pemberdayaan Sosial di Kecamatan Tanggulangin, dan apa saja yang dapat mempengaruhi eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dicapai antara lain:

1. Manfaat Akademis
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi, menambah wawasan, serta berkontribusi positif terhadap kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mengenai eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap tugas pokok dan fungsi pemberdayaan social di Kecamatan Tanggulangin
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi dalam penelitian yang sejenisnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan baru mengenai eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap tugas pokok dan fungsi pemberdayaan social, serta syarat untuk menempuhtugas akhir dan mendapatkan gelar Strata Satu (S1) pada prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Muhammadiyah Malang

- b. Bagi Dinas/Instansi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan program-program pemerintahan serta bermanfaat untuk perbaikan dan pengembangan profesi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam menunjang kualitas pelayanan sosial
- c. Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bentuk pembelajaran, bahan evaluasi, serta acuan keilmu bagi para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dalam penulisan laporan skripsi ini dan agar lebih terarah dalam isi pembahasan serta demi untuk berjalan baiknya penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti. Maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini sebagai berikut :

1. Profil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanggulangin
2. Fungsi Pokok dan Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanggulangin dalam Menyelenggarakan Kegiatan Kesejahteraan Sosial
3. Bentuk Pelayanan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Pemberdayaan Sosial di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
4. Eksistensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap Tugas pokok dan Fungsi di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.